

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk adalah peristiwa bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dalam suatu wilayah. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus bertambah ini mengakibatkan adanya beban untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kemerosotan standar kehidupan (Purwati, 2015). Data *real time* situs *World Population Review* mengungkapkan, jumlah penduduk dunia pada 4 Juni 2023 telah mencapai 8.039.642.225 jiwa. Data tersebut sejalan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam laporan bertajuk *World Population Prospects 2022*, PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai 8 miliar jiwa per 15 November 2022 lalu. Pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini disebabkan oleh peningkatan bertahap dalam umur manusia karena peningkatan kesehatan masyarakat, nutrisi, kebersihan pribadi dan obat-obatan. Ini juga merupakan hasil dari tingkat kesuburan yang tinggi di beberapa negara. (United Nation, 2022).

Berdasarkan data *The World Bank* (2021) secara global *total fertility rate* menurun dari 3.2 kelahiran hidup per wanita pada tahun 1990 menjadi 2.5 pada tahun 2019 dan menjadi 2.3 pada tahun 2021. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 5 di dunia memiliki *total fertility rate* sebesar 2.2 di tahun 2021 dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sebesar 1.8 dan Singapura sebesar 1.1. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk Indonesia ditaksir sebanyak 274,20 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut lebih banyak 0,96% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 271,58 juta jiwa (BPS, 2022).

Jumlah penduduk Banten di tahun 2022 mencapai 12,25 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan jumlah penduduk 12,06 juta. Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,35 juta orang, bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Banten, Kabupaten Tangerang

adalah yang tertinggi populasinya, diikuti Kota Tangerang (17,19%), Kota Tangsel (13,21%), Kabupaten Serang (12,00%), Kabupaten Lebak (10,35%), Kabupaten Pandeglang (9,68%), Kota Serang (5,36%) dan terendah Kota Cilegon (3,41%) (BPS, 2022).

Hasil *long form* SP2020 dalam *Grand Design* Kependudukan Indonesia menyebutkan bahwa untuk dilakukan pengendalian kuantitas penduduk diperlukan dua pilar. Pilar pertama adalah pengaturan fertilitas (TFR), dimana disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dijaga pada tingkat fertilitas ideal. Dan pilar kedua adalah dengan penurunan mortalitas (IMR dan MMR). Melalui pengendalian 2 pilar tersebut, maka penduduk dapat tumbuh seimbang (BPS, 2023). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kelahiran total (TFR) secara nasional cenderung menurun dari 2,6 (SDKI 2017) menjadi sekitar 2,24 anak per perempuan usia reproduksi (Pendataan Keluarga 2021). Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024 (BKKBN, 2020).

Salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Kemenkes, 2022). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan

menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (BKKBN, 2020).

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024, selain menurunnya TFR mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024 sasaran strategis juga ditetapkan untuk meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*unmet need* 8,6 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024, menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target 25/1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18/1000 kelahiran pada tahun 2024. Pemerintah Indonesia merekomendasikan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) karena disebutkan sebagai salah satu hasil yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Indonesia 2020-2024 (Gayatri, 2020). MKJP merupakan kontrasepsi yang aman, efektif, murah, reversibel, dan memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih baik daripada metode hormonal lainnya dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dalam setahun serta mencegah kehamilan untuk waktu yang lama (Shegaw et al., 2014). BKKBN menetapkan Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi Peserta KB Aktif MKJP (PPM-PA MKJP) tahun 2020-2024 sebagai kontrak kinerja provinsi yang harus dicapai. Oleh karena itu, jumlah peserta KB aktif MKJP menjadi salah satu fokus perhatian yang harus digarap oleh pemerintah.

BKKBN menyatakan capaian prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara Nasional pada 2022, sebesar 22,6 % dari target 28% pada tahun 2024 (Rahmitasari P et al., 2023). Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 59,9%, diikuti pil sebesar 15,8%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat

efektifitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk MKJP yaitu IUD/AKDR, Implan, MOP dan MOW (Kemenkes, 2022).

Berdasarkan SDKI 2017 capaian kesertaan ber KB untuk seluruh metode KB yaitu sebesar 63,6% dengan peserta KB cara modern sebesar 57,2% menurun dari hasil SDKI 2012 yaitu sebesar 57,9% (SDKI, 2018). Di provinsi Banten persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB pada tahun 2022 sebesar 58,83%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (58,55%) (BPS, 2021). Menurut data BKKBN, salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Curug memiliki 2 kampung KB di tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 3 kampung KB. Jumlah pasangan subur di Kecamatan Curug tahun 2021 yaitu berjumlah 44.673 di tahun 2021. Menurut jenis kontrasepsi yang digunakan kecamatan Curug memiliki jumlah 22.599 orang (73,16%) yang menggunakan KB non MKJP dan 8.403 orang (26,61%) menggunakan KB MKJP (BKKBN, 2021).

Profil Statistik Kesehatan 2021 yang dikeluarkan oleh BPS memperlihatkan bahwa persentase Pasangan Usia Subur (PUS) (15-49 tahun) yang sedang menggunakan alat KB/cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan pada tahun 2021 sebesar 55,06%. Terdapat beragam faktor yang memengaruhi penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat. Gafar, Suza, Efendi, Pramono, & Susanti melalui penelitiannya di tahun 2020 mengungkapkan bahwa umur, jumlah anak yang masih hidup, tingkat pendidikan, *wealth index*, dan akses ke informasi dapat memengaruhi penggunaan kontrasepsi (BPS, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan Setyawati (2022) menunjukkan bahwa umur, pengetahuan, efek samping, dukungan suami, jumlah anak dan konseling KB memiliki hubungan dengan pemilihan MKJP. Penelitian (Hasibuan et al.,

2021) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang adalah jumlah anak, dukungan dan efek samping. Berdasarkan hasil jawaban responden mayoritas efek samping sekarang yang dialami akseptor MKJP sama seperti saat menggunakan non MKJP yaitu haid tidak teratur dan darah haid yang menjadi lebih banyak. Efek samping yang paling banyak mereka alami yaitu haid lebih lama dan darah haid yang lebih banyak. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam pemakaian alat kontrasepsi, mereka yang berumur tua mempunyai peluang lebih kecil untuk menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan dengan yang berumur muda.

Hasil penelitian Suryanti (2019) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara umur terhadap penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada wanita usia subur di Puskesmas Paal V Kota Jambi Tahun 2018. Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang adalah umur, paritas, pekerjaan, biaya ber-KB dan pengambilan keputusan (Khatimah et al., 2022).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di Puskesmas Binong, jumlah wanita usia subur di Kelurahan Binong adalah 16.005 pada tahun 2022. Jumlah kelahiran di Puskesmas Binong pada tahun 2021 berjumlah 1.449, lalu mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 991, dan jumlah kelahiran di tahun 2023 sampai bulan Juni tercatat berjumlah 500. Jumlah akseptor KB MKJP di Puskesmas Binong mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, akseptor KB berjumlah di Puskesmas Binong berjumlah 10.260, dengan jumlah KB MKJP 789 (7,6%) dan KB non MKJP 9.471 (92,4%). Jumlah akseptor KB di Puskesmas Binong pada tahun 2022 berjumlah 8.499, dengan jumlah KB MKJP 582 (6,8%) dan non MKJP 7.917 (93,2%). Akseptor KB di Puskesmas Binong dari bulan Januari 2023 sampai bulan November 2023 berjumlah 7.480 dengan KB MKJP 378 (5%) dan KB non MKJP 7.102 (95%).

Hal ini mengindikasikan bahwa minat WUS di Puskesmas Binong terhadap kontrasepsi MOW, MOP, IUD, dan Susuk KB atau implant yang merupakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih sangat rendah

(7%) dibandingkan non MKJP yaitu suntik KB, pil, dan kondom (93%). Namun demikian, penggunaan MKJP lebih dianjurkan oleh pemerintah dikarenakan MKJP paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran dan menurunkan *unmet need*. Oleh karena itu, pemerintah menekankan penggunaan MKJP bagi PUS untuk mengatur kelahiran maupun menghentikan kehamilan.

Berdasarkan rangkaian penjelasan yang ada di latar belakang diatas, banyak faktor yang menjadi determinan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Dengan adanya situasi ini, perlu dianalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan pemilihan MKJP pada akseptor KB, meliputi umur, pendidikan, pekerjaan dan jumlah anak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor Predisposisi yang Berhubungan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Wanita Usia Subur (WUS) di Wilayah Kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Tercatat akseptor KB MKJP di Puskesmas Binong pada tahun 2021 sebesar 7,6%, di tahun 2022 sebesar 6,8%, dan di tahun 2023 sampai bulan November 2023 sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa minat WUS di Puskesmas Binong terhadap kontrasepsi MKJP masih sangat rendah dibandingkan non MKJP. Sedangkan jumlah penduduk diperkirakan akan terus bertambah mencapai 318,9 juta tahun 2045 dan salah satu sasaran strategis dalam Renstra BKKBN 2020-2024 yaitu menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024 dan meningkatkan capaian prevalensi MKJP secara Nasional sebesar 28% pada tahun 2024. Dan metode kontrasepsi MKJP merupakan metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran dan menurunkan *unmet need*. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Faktor Predisposisi yang Berhubungan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Wanita Usia Subur (WUS) di Wilayah Kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang Tahun 2023”.

1.3 Pertanyaan penelitian

1. Apa saja faktor predisposisi yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi panjang di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
2. Bagaimana gambaran umur akseptor KB di Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
3. Bagaimana gambaran pendidikan akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
4. Bagaimana gambaran pekerjaan akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
5. Bagaimana gambaran jumlah anak akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
6. Apakah ada hubungan antara umur dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang pada wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
7. Apakah ada hubungan antara pendidikan dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang pada wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
8. Apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang pada wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?
9. Apakah ada hubungan antara jumlah anak dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang pada wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Mengetahui faktor predisposisi yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi panjang pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.

1.4.2 Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran umur akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui gambaran pendidikan akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui gambaran pekerjaan akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui gambaran jumlah anak akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- e. Untuk mengetahui hubungan umur dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- f. Untuk mengetahui hubungan pendidikan dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- g. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.
- h. Untuk mengetahui hubungan jumlah anak dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.4.2 Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan usia subur, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan dijadikan sebagai pemahaman mendalam mengenai seberapa pentingnya metode kontrasepsi jangka panjang dalam menerapkan program pemerintah 2 anak lebih baik dan mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat yang telah diperoleh.

1.4.3 Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman ilmiah dan dijadikan sebagai pengalaman baru dalam melakukan penelitian. Serta diharapkan mampu mengutarakan asumsi terkait permasalahan mengenai determinan kurangnya minat WUS terhadap MKJP.

1.4.4 Bagi Akademi

Manfaat bagi universitas Esa Unggul adalah diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait faktor predisposisi yang berhubungan dengan pemilihan metode MKJP.

1.4.5 Bagi Puskesmas Binong

Dapat memberikan informasi tentang faktor predisposisi yang berhubungan dengan pemilihan metode MKJP, sehingga dapat menangani masalah pemilihan MKJP pada pasangan usia subur dan dapat menjadi salah satu analisis lanjut serta evaluasi dari kualitas data yang ada.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor predisposisi yang berhubungan dengan pemilihan metode MKJP pada WUS di Puskesmas Binong tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dikarenakan minat WUS di Puskesmas Binong terhadap kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih sangat rendah dibandingkan non MKJP, dimana tercatat akseptor KB MKJP di Puskesmas Binong pada tahun 2021 sebesar 7,6%, di tahun 2022 sebesar 6,8%, dan di tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 sebesar 5%. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan Februari 2024. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Binong Kabupaten Tangerang. Populasi penelitian ini adalah wanita usia subur (WUS) yang datang ke Puskesmas Binong. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan desain penelitian *case control* dengan perbandingan 1:1 yakni sampel sebanyak 62 WUS yang menggunakan MKJP (kasus) dan 62 WUS yang

menggunakan non MKJP (kontrol). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui telaah dokumen data register KB. Analisis data yang digunakan yakni menggunakan uji *chi-square*.